

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain dapat berlangsung dalam berbagai macam bentuk kerjasama. Kerjasama yang berlangsung di dunia internasional pada dasarnya dikarenakan adanya suatu kesadaran bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara mandiri tanpa kerjasama dengan negara lain.¹ Salah satu bentuk interaksi dalam dunia internasional yaitu pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang. Selama ini semua negara yang ada di dunia melakukan dinamika kerjasama internasional dengan pola *North-South*, yang merupakan pola yang menunjukkan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju.²

Pola *North-South* menimbulkan ketimpangan karena yang dianggap minoritas adalah selalu negara berkembang, dan kerjasama yang dilakukan terlihat seperti kegiatan pemberian bantuan yang hanya dari negara maju kepada negara berkembang. Agar tidak terjadi ketidak seimbangan dibentuk kerangka kerja internasional baru, Kerjasama Selatan Selatan dan *Triangular* (KSST), yang adalah penyatuan dua kerangka kerjasama internasional, Kerjasama Selatan Selatan dan Kerjasama *Triangular*.³ Kerjasama *Triangular* adalah kerjasama dua negara berkembang ataupun lebih dengan pihak ketiga yang merupakan negara maju, sedangkan KSS kerjasama yang terjadi antara dua negara berkembang atau

¹ Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi'raz Prakoso, "Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular", Jurnal Transborder, Vol.1 No.1. 2017. 12.

² Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi'raz Prakoso, 12.

³ Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi'raz Prakoso, 3.

lebih yang meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan lainnya.⁴

Salah satu negara maju dan yang dianggap paling sukses dalam membangun perekonomiannya adalah Jepang. Hal ini terbukti dari perjalanan panjang sejarah pembangunan ekonomi Jepang yang terbagi menjadi dua bagian yaitu: pada abad ke-19 (zaman restorasi meiji sebagai industrialisasi awal Jepang) sampai awal Perang Dunia Kedua, serta dari masa pertumbuhan cepat (pasca Perang Dunia Kedua, 1950-an) sampai saat ini. Hal ini dapat menjadi bukti untuk memperkuat posisi Jepang sebagai negara yang mampu untuk memajukan perekonomiannya, terutama untuk masa setelah PD II, dimana keadaan ekonomi Jepang dapat berubah secara drastis, dari negara yang miskin menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia, khususnya di wilayah Asia.⁵

Kerjasama yang dilaksanakan oleh Jepang memanfaatkan dana dan teknologi yang dimiliki melalui kerangka bantuan pembangunan resmi yang dikenal dengan *Official Development Assistance* (ODA). ODA Jepang dilaksanakan dengan tujuan memberikan sumbangsih dalam perdamaian dan pembangunan masyarakat dunia yang juga akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan kesejahteraan Jepang sendiri. Dalam pelaksanaannya, ODA Jepang memiliki beragam bentuk kerjasama baik melalui institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional lainnya yang disesuaikan

⁴Bulbul Abdurachman, 3.

⁵Siti Daulah Wiratno, "Kebijaksanaan Bantuan Ekonomi Jepang Kepada Indonesia", Jurnal studi Jepang, pusat studi Jepang UGM, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Vol. 1.

dengan kebutuhan di masing-masing negara berkembang yang menerima bantuan.⁶

ODA terdiri dari dua bentuk kerangka kerjasama yaitu ODA Bilateral dan ODA Multilateral. ODA Bilateral yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam membina hubungan bilateral Jepang dengan negara berkembang melalui bantuan yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Sedangkan, ODA Multilateral disalurkan melalui berbagai organisasi internasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan serta sebagai bentuk netralitas Jepang dalam lingkup internasional.⁷

Dilihat dari nilai sejarah, hubungan bilateral Indonesia dan Jepang memiliki kaitan yang sangat erat dan menarik untuk dikaji dikarenakan Indonesia merupakan negara bekas jajahan Jepang. Walaupun didasarkan atas kisah masa lalu yang suram, namun saat ini Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan persahabatan yang erat dalam bentuk kerjasama dan pertukaran di dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Sejak tahun 1960-an Indonesia telah menerima bantuan ekonomi yang cukup besar dari Jepang dibandingkan dengan bantuan dari negara-negara barat. Mengalirnya bantuan Jepang ke Indonesia sebagai akibat krisis-krisis politik ekonomi yang muncul pada akhir tahun 1965.⁸

JICA adalah organisasi yang menyalurkan ODA Jepang (*Japan's Official Development Assistance*) yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan pengembangan komunitas internasional. Bantuan yang diberikan

⁶Japan's Official Development Assistance White Paper 2010, <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2010/index.html> (Diakses pada 14 November 2018)

⁷Japan's Official Development Assistance White paper, 20.

⁸Siti Daulah Wiratno, 45.

berupa bentuk teknis dan pinjaman atau hibah. Misi JICA adalah sebagai berikut⁹:

"We, as a bridge between the people of Japan and developing countries, will advance international cooperation through the sharing of knowledge and experience and will work to build a more peaceful and prosperous world".¹⁰

Sebagai organisasi yang bertugas mengelola ODA, JICA bertugas untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara penerima bantuan melalui kerjasama teknis, pinjaman dan hibah yang didasarkan pada kepentingan masing-masing negara.¹¹

Dalam melaksanakan misinya, ada banyak isu yang menjadi fokus dari JICA dalam membantu negara berkembang. Infrastruktur ekonomi yang masih berkembang, pengurangan tingkat kemiskinan, dan pemberdayaan SDM dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan suatu negara, merupakan beberapa isu yang menjadi fokus dari program ini. Isu kesehatan memang merupakan isu yang terbilang baru dalam dunia hubungan internasional. Dunia hubungan internasional menunjukkan adanya berbagai kecenderungan baru yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Isu kesehatan menjadi fokus utama di beberapa negara karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dunia dan menimbulkan kesadaran pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.¹²

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara berkembang adalah kurangnya akses pelayanan kesehatan yang layak dan masih sangat kurangnya

⁹JICA Mission Statement, diakses melalui <http://www.jica.go.jp/english/about/mission/index.html> (Diakses pada 14 November 2018).

¹⁰JICA Mission Statement,.

¹¹JICA, Japan's ODA and JICA, <https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html> (Diakses pada 14 November 2018).

¹²JICA, Japan's ODA and JICA,.

pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi mereka. Oleh karena itu, salah satu fokus pemberian bantuan JICA kepada negara-negara berkembang adalah pada bidang kesehatan termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang kesejahteraan masyarakatnya terus meningkat seiring waktu, walaupun masih terdapat kesenjangan di beberapa wilayah, termasuk dalam masalah kesehatan ibu dan anak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, indikator kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat diukur dari menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi serta panjang umur harapan hidup.¹³

Buku KIA merupakan bentuk peran serta aktif keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan anak, dan keberhasilan penerapan Buku KIA sebagai salah satu alat untuk meningkatkan cakupan pelayanan KIA tidak terlepas dari peran para pihak terkait dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.¹⁴ Dr. Eni Gustina, Direktur kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menjelaskan sejarah kerjasama JICA dalam menyusun buku KIA untuk para ibu di Indonesia, buku KIA yang diadopsi dari Jepang ini dimulai di Indonesia untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi di Indonesia yang tinggi. Beliau juga membahas mengenai penyebaran dan perkembangan buku KIA saat ini, dan bagaimana Indonesia memegang peran dalam menyebarkan buku ini ke negara-negara berkembang lainnya.¹⁵

¹³Ade Riani Sandra, Hubungan antara pemanfaatan buku KIA dan kepatuhan imunisasi, hal 17. Diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20440368-S-Pdf-Ade%20Riani%20Sandra.pdf> (Diakses pada 12 November 2018).

¹⁴JICA Indonesian Office, diakses melalui <https://www.facebook.com/jicaindonesia/posts/japan-international-cooperation-agency-jica-menggelar-acara-media-gathering-bert/655318447999149/> (Diakses pada 13 November 2018).

¹⁵JICA Indonesian Office,.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai baik dalam perkembangan pemanfaatan buku KIA. Sebab itu sejak 2007 Kementerian Kesehatan (Direktorat Kesehatan Keluarga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat) bekerja sama dengan JICA sudah menyelenggarakan workshop *Third Country Training Program* (TCTP) sebanyak 8 kali.¹⁶ TCTP ialah forum yang berasal dari berbagai negara untuk mendapatkan pembelajaran dan pelaksanaan pemanfaatan buku KIA di Indonesia serta wadah untuk bertukar dan berbagi informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan buku KIA di negara peserta. Tahun 2017 TCTP ke 9 diadakan di Sumatera Barat dengan tema *Enhancing the Quality of Maternal and Child Health Program and the Implementation of Maternal and Child Handbook in 2017 through Community Empowerment*, kegiatan ini dihadiri oleh 26 peserta yang mewakili 6 negara, yaitu Afghanistan, Kenya, Filipina, Tajikistan, Thailand serta Indonesia.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular* (KSST) bukan lagi sebuah isu yang baru bagi Indonesia. Tahun 1995 Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung, sejak saat itu kebijakan KSST di Indonesia dimulai. Jepang melalui JICA membantu Indonesia dalam isu kesehatan ibu dan anak dengan memperkenalkan Indonesia kepada buku KIA yang sudah terlebih dahulu diaplikasikan di Jepang. Buku KIA sudah dipakai di semua provinsi yang ada di Indonesia, namun tidak semua wilayah yang ada dianggap berhasil dalam mengaplikasikan buku KIA, Sumatera Barat adalah salah satu wilayah yang

¹⁶Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Belajar Buku KIA di Third Country Training Program, <http://kesmas.depkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/090419-belajar-buku-kia-di-third-country-training-program>, (Diakses pada 26 Desember 2018).

¹⁷Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Belajar Buku KIA di Third Country Training Program,.

dianggap berhasil dalam penggunaan buku KIA. Oleh karena itu menarik untuk melihat bagaimana implementasi *Triangular Cooperation* dalam pengaplikasian buku KIA di Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang berhasil dalam penggunaan buku KIA di Indonesia untuk membantu penyebaran buku KIA kepada negara berkembang lainnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah, “Bagaimana Implementasi *Triangular Cooperation* Dalam Kesuksesan Buku KIA Di Sumatera Barat?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *Triangular Cooperation* dan kesuksesan buku KIA di Sumatera barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, menambah pengetahuan mengenai Kerjasama Selatan Selatan *Triangular* dan mengetahui sejauh mana peran dan eksistensi negara yang berkembang dengan negara berkembang lainnya.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, penelitian ini menggunakan acuan pada beberapa tinjauan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dan landasan untuk penulis didalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian yang menganalisis tentang Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular*.

Tinjauan pustaka pertama, berjudul “Kerjasama Selatan-Selatandan *Triangular* Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global”,

jurnal yang ditulis oleh Stanislaus Apresian,¹⁸ menjelaskan tentang pentingnya Indonesia untuk memberikan bantuan luar negeri dengan skema KSST karena dengan KSST Indonesia memberikan kontribusi terhadap pencapaian kepentingan kolektif yang berkaitan dengan isu kesejahteraan global. Dengan melakukan KSST Indonesia menciptakan *mutual gain* baik untuk Indonesia ataupun bagi negara yang menerima bantuan. KSST dapat mempererat hubungan dengan negara penerima bantuan, hubungan baik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Keuntungan tidak bisa didapat dalam jangka pendek namun akan didapat dalam jangka panjang.¹⁹ Dalam tulisan ini penulis mengatakan masih terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikan KSST karena tidak semua masyarakat Indonesia yang dapat memahami isu KSST dan apakah perlu memberikan bantuan kepada negara lain yang sedang berkembang juga, sementara masih terdapat permasalahan pembangunan di Indonesia sendiri.²⁰

Penulis menggunakan jurnal ini sebagai studi pustaka dalam penelitian ini, untuk membantu penulis memahami tentang pengimplementasian skema KSST di Indonesia. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: dalam tulisan ini berfokus pada kenapa Indonesia memberikan bantuan luar negeri menggunakan skema KSST, dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan KSST.

¹⁸Stanislaus Apresian, "Kerjasama Selatan-Selatandan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol 12, No 2. (2016).

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2653> (Diakses pada 12 November 2018).

¹⁹Stanislaus Apresian,5.

²⁰Stanislaus Apresian,20.

Sedangkan penulis akan berfokus pada implementasi KSST dalam kesuksesan buku KIA di Sumatera Barat.

Tinjauan pustaka kedua, “Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular*”, ditulis oleh Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi’raz Prakoso²¹ menjelaskan tentang, sejak tahun 1981 Indonesia telah ikut serta secara aktif dan mempromosikan bantuan pembangunan internasional salah satunya dengan skema KSST. KSST merupakan model kerjasama yang digunakan dan dikembangkan untuk membantu negara berkembang untuk mencapai target pembangunan negara mereka. Keikutsertaan Indonesia dalam pemberian bantuan bagi negara lain adalah hasil dari proses yang panjang. Hal ini dimulai dari Indonesia sebagai penerima bantuan dari negara seperti Jepang dan Amerika pada tahun 1960an, setelah itu Indonesia mampu mengembangkan diri melalui proyek-proyek bantuan yang dianggap sukses diimplementasikan di Indonesia yang dapat dilihat dari perkembangan Indonesia dalam beberapa sektor.²²

Indonesia sebagai salah satu anggota forum G-20 menjadikan peran Indonesia di KSST berubah seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan menjadikan Indonesia sebagai “*new emerging donors*” di KSST sendiri. Saat ini Indonesia bukan hanya penerima tetapi juga berperan ganda sebagai negara yang memberikan bantuan kepada negara penerima lainnya. Keanggotaan Indonesia dalam G20 memberikan kesempatan untuk Indonesia menyuarkan pandangan negara berkembang terhadap perubahan dan

²¹Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi’raz Prakoso, “Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular*”, Jurnal Transborder, Vol.1 No.1. 2017.

²²Bulbul Abdurachman dan Bagus Mi’raz Prakoso, “Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular*”, Jurnal Transborder, Vol.1 No.1. 2017. 13.

perkembangan dunia yang bisa mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang.²³

Penulis menggunakan tulisan ini sebagai studi pustaka dalam penelitian ini, untuk membantu penulis memahami tentang bagaimana peran Indonesia dalam pengaplikasian skema KSST. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: dalam tulisan ini berfokus pada bentuk peran aktif dari Indonesia dalam KSST, seperti *South-South Experience Exchange Facility* oleh *World Bank* yang merupakan sebuah *multidonors trust fund* yang memfasilitasi sharing pengalaman antara negara klien *World Bank*, sharing ini dilaksanakan atas dasar permintaan negara penerima bantuan (*recipient*) serta dirancang khusus dengan target tertentu yang hasilnya dimasukkan kedalam *online knowledge library*. Tulisan ini juga fokus membahas penyelenggaraan *Capacity Building* di berbagai bidang yang diselenggarakan oleh Indonesia. Sementara penulis akan berfokus pada peran Indonesia khususnya Sumatera Barat dalam mengimplementasikan *Triangular Cooperation*.

Tinjauan pustaka ketiga, berjudul "*Triangular Cooperation and The Global Governance of Development Assistance: Canada and Brazil as "co-donors"*", ditulis oleh Deborah B.L. Farias²⁴, menjelaskan bahwa *Triangular Cooperation* adalah instrumen yang berharga dalam *toolbox* inisiatif peningkatan pembangunan, terlepas dari kompleksitas praktis terkait dengan konsepsi dan implementasinya. Klaimnya adalah bahwa setidaknya ada dua motivasi penting

²³Bulbul Abdurachman, 13.

²⁴Deborah B.L Farias, "Triangular Cooperation and the Global Governance of Development Assistance: Canada and Brazil as Co-donors", *Canadian Foreign Policy Journal*, 21:1, DOI: 10.10.80/11926422.2013.845583, <http://dx.doi.org/10.10.80/11926422.2013.845583>. (Diakses pada 8 November 2018).

bagi donor tradisional untuk terlibat dengan struktur baru ini. Pertama, *Triangular Cooperation* dapat memfasilitasi penerapan solusi yang lebih mungkin untuk bekerja di lapangan dan dengan biaya yang lebih rendah, baik dengan menambah kekuatan finansial, keahlian manajemen, kapasitas operasional dan / atau memberikan kemudahan budaya contohnya bahasa. Motivasi kedua dan yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan antara "co-donor". Tidak hanya mereka dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain (misalnya, kapasitas keuangan, legitimasi, pengalaman, dll.), mekanisme ini dapat membantu donor "tradisional" untuk memperkuat hubungan mereka dengan donor "baru", terutama mereka yang pengaruh globalnya melampaui bidang bantuan pembangunan.²⁵

Tulisan ini membahas potensi *Triangular Cooperation* untuk Kanada dengan melibatkan Brasil sebagai "co-donor," sehubungan dengan indikasi berkelanjutan dari minat untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Amerika Selatan pada umumnya, dan dengan pembangkit tenaga listrik Amerika Selatan khususnya. Kasus ini digunakan untuk menggambarkan tidak hanya karakter yang berubah dari tata kelola global bantuan pembangunan mengingat relevansi donor baru yang tak terbantahkan, tetapi juga untuk membantu memahami potensi dan keterbatasan *Triangular Cooperation* dalam meningkatkan hubungan antara penyedia pembangunan. Dalam kasus Kanada, *Triangular Cooperation* dapat berfungsi sebagai peluang untuk menjalin ikatan yang lebih erat dengan Brasil dan Amerika Latin, yang sangat selaras dengan visi Cameron dan Hecht (2008) tentang Kanada yang berkontribusi untuk mendukung

²⁵Deborah B.L Farias, 1-14.

kebijakan penguatan kelembagaan dan inklusi di wilayah tersebut. Struktur *Triangular Cooperation* tidak diragukan lagi begitu kompleks. Ada isu-isu politik dan birokratis yang rumit yang perlu ditangani, dan diperlukan tingkat komitmen yang signifikan untuk mengubah ide yang baik menjadi tindakan nyata tetapi, sekali lagi ini dapat dikatakan untuk kemungkinan inisiatif kerjasama baru antar negara.²⁶

Penulis menggunakan tulisan ini sebagai studi pustaka dalam penelitian ini, untuk membantu penulis memahami tentang implementasi *Triangular Cooperation*. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: dalam tulisan ini berfokus pada evolusi bantuan pembangunan dari dua perspektif: donor DAC (*Development Assistance Committee*) dan apa yang disebut kerja sama "Selatan-Selatan". Kemudian akan membahas aspek positif dan negatif luas dari *Triangular Cooperation*, terutama dari perspektif donor. membahas kasus empiris dari *Triangular Cooperation* Kanada dengan Brasil sebagai "co-donor," dengan menyoroti penguat dan rintangannya. Sementara penulis akan berfokus pada peran *Triangular Cooperation* dan implementasinya pada kesuksesan buku KIA di Sumatera Barat.

Tinjauan pustaka keempat, berjudul "*Scaling Up South-South and Triangular Cooperation*", oleh JICA *Research Institute*, editor: Hiroshi Kato²⁷ menjelaskan tentang, beberapa poin penting yang harus dilakukan jika ingin memperluas KSST lebih lanjut. Pertama, di wilayah-wilayah di mana KSST menawarkan *comparative advantage* yang hanya dapat diberikan oleh bentuk

²⁶Deborah B.L Farias, 2.

²⁷Japan International Cooperation Agency, "*Scaling Up South-South and Triangular Cooperation*". JICA Research Institute.

kerjasama ini saja, negara harus berupaya menarik manfaat ini sejauh mungkin. Kedua, negara harus memanfaatkan sepenuhnya pendekatan yang telah terbukti memberikan hasil yang sukses sejauh ini, seperti program pelatihan efektifitas *Triangular* yang diselenggarakan di sekitar Pusat Keunggulan (*Centers of Excellence*), program kemitraan dan berbagai negara yang berkolaborasi dengan organisasi untuk integrasi/kerjasama regional sebagai platform. Ketiga, kita harus menjadikan *mainstream* perspektif “pengembangan kapasitas” dalam KSST. Jepang adalah pelopor dalam KSST, dan memiliki banyak pengalaman berharga di bidang ini. Selain itu, keberadaan *Centers of Excellence* di berbagai negara yang dimungkinkan melalui proyek kerjasama Jepang sebelumnya merupakan aset utama untuk KSST di masa depan. Diharapkan keunggulan ini dapat digunakan untuk lebih memperkuat dan meningkatkan KSST.²⁸

Tulisan ini membahas tentang kerjasama pembangunan internasional tak pelak lagi berkaitan dengan pembelajaran bersama dan penemuan solusi bersama, dan untuk itu KSST harus ditingkatkan. Pada dasarnya KSS sebagai proses penciptaan pengetahuan bersama, dan memberikan perhatian khusus pada pengaturan kelembagaan dan aspek pengembangan kapasitas. Tulisan ini melihat ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan KSS. KSS bisa efektif ketika mereka berurusan dengan jenis pengetahuan yang tepat yang tidak tersedia di tempat lain dan sangat dibutuhkan oleh penerima manfaat. Penulis berpendapat pentingnya memiliki basis pengetahuan dan dukungan terus-menerus, untuk yang keduanya, penulis berpendapat, memiliki COE (*Center of Excellent*) bisa menjadi instrumen. Penulis menekankan pentingnya mendorong proses

²⁸Japan International Cooperation Agency, Ch.3.

penciptaan pengetahuan interaktif, yang menurut penulis terdapat berbagai pendekatan. Penulis fokus ke dalam proses pengembangan kapasitas untuk menjadi penyedia kerjasama. Karena proses itu pasti akan menjadi latihan yang memakan waktu, diperlukan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan dari komunitas internasional.²⁹

Penulis menggunakan jurnal ini sebagai studi pustaka dalam penelitian ini, untuk membantu penulis memahami tentang *Triangular Cooperation*. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: dalam tulisan ini berfokus pada pengetahuan seperti apa yang diciptakan melalui proyek KSST yang berhasil, fokus pada masalah pengaturan kelembagaan untuk membuat penciptaan pengetahuan melalui KSST yang berkelanjutan. Serta melihat proses pengembangan kapasitas KSST di tingkat nasional dan cara-cara untuk membantu proses semacam itu dari luar dalam membangun lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan penulis akan berfokus pada implementasi KSST dalam kesuksesan buku KIA di Sumatera Barat.

Tinjauan pustaka kelima, berjudul “Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia”, ditulis oleh Adirini Pujayanti³⁰ berisikan tentang, kebijakan luar negeri Indonesia yang dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum-forum internasional, dengan *soft power* negara ikut memberikan bantuan dalam Kerjasama Selatan-Selatan antar negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah

²⁹Japan International Cooperation Agency. Ch.4.

³⁰Adirini Pujayanti, “Kerjasama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia”, Peneliti Madya Bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPRD RI, Jakarta.

mempunyai andil yang besar dalam upaya perbaikan tatanan bantuan pembangunan internasional. Kebijakan luar negeri KSS adalah terobosan untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana manfaat dari pengimplementasian KSS di berbagai aspek salah satunya manfaat KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia dapat memperluas jaringan diplomasi Indonesia di dunia internasional.³¹

Penulis menggunakan jurnal ini sebagai studi pustaka dalam penelitian ini, untuk membantu penulis memahami tentang KSS di Indonesia dan membedakan KSS dengan KSST. Adapun perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: dalam tulisan ini penulis berfokus pada apa tujuan Indonesia dalam pengaplikasian skema KSS dan apa saja manfaat yang diperoleh Indonesia jika mengimplementasikan KSS, sedangkan penulis akan meneliti implementasi dari *Triangular Cooperation* dan dalam tulisan ini hanya sedikit yang membahas tentang KSST karena lebih fokus pada KSS.

1.7 Kerangka Konseptual

Setelah perang dunia, praktek-praktek dan teori pembangunan lebih banyak berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada pandangan dan pengalaman negara-negara utara. Konsep negara utara sendiri dalam sistem dunia dianggap sebagai negara-negara maju. Negara-negara maju ini dianggap sukses dalam pertumbuhan ekonomi. Dilain pihak, negara-negara yang tidak tergolong ke negara maju (utara) disebut sebagai negara selatan. Negara selatan yang terbelakang diharapkan dapat berkembnag layaknya negara utara dengan mengapdosi berbagai kebijakan yang sama dengan negara utara. Lebih jauh,

³¹Adirini Pujayanti, 10.

negara utara dianggap bertanggung jawab untuk membantu negara selatan dalam mencapai pertumbuhan ekonominya menuju modernitas. Hal ini menyebabkan munculnya hubungan Utara-Selatan dalam pembangunan internasional.³²

Walaupun begitu, dalam 20 tahun terakhir terjadi pergeseran paradigma mengenai pembangunan. Pembangunan tidak lagi hanya dilihat sebagai bantuan dari negara Utara terhadap negara Selatan melainkan sesama negara Selatan juga dapat berkerjasama dalam isu-isu pembangunan. Hal ini tak terlepas dari bermunculannya *emerging countries* yang memainkan peran besar dalam ekonomi dan politik dunia. Munculnya pemain baru yang merupakan negara Selatan tapi dengan kekuatan ekonomi yang besar ini pada akhirnya menginisiasi berbagai kerjasama baik di bidang perdagangan, investasi, diplomasi, bantuan luar negeri, dan migrasi. Fenomena kerjasama antar berbagai negara-negara Selatan ini pada akhirnya memunculkan konsep Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).³³

Secara konseptual, KSS dapat diartikan sebagai suatu proses di mana dua atau lebih negara berkembang mengejar tujuan pengembangan kapasitas individu dan/atau bersama melalui pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan pengetahuan teknis, dan melalui aksi kolektif regional dan antardaerah, termasuk kemitraan yang melibatkan pemerintah, organisasi regional, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, untuk keuntungan individu dan/atau timbal balik di dalam dan di seluruh wilayah. Kerja sama Selatan-Selatan bukanlah

³²Giles Mohan, "Emerging Powers in International Development: Questioning South-South Cooperation". dalam Jean Grugel and Daniel Hammet "The Palgrave Handbook of International Development", Palgrave Mac Millan London 2016.

³³Giles Mohan, 279-295.

pengganti, melainkan pelengkap bagi kerja sama Utara-Selatan.³⁴ Prinsip-prinsip kunci untuk kerja sama Selatan-Selatan adalah³⁵:

1. Solidaritas dan Kolaborasi - menyangkut kepekaan terhadap isu-isu global yang mempengaruhi banyak daerah, seperti kemiskinan dan kelaparan, perubahan iklim dan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Kemitraan - kemitraan dalam membangun egaliter, hubungan horizontal di antara negara-negara yang terlibat dalam kerjasama *Triangular*, terlepas dari peran atau fungsi spesifik mereka. Ini tersirat dalam dialog politik, koordinasi teknis dan keuangan serta pembentukan prosedur dan posisi yang harmonis di semua tahap kerjasama - mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

3. Penghormatan terhadap perbedaan budaya dan otonomi organisasi - penghormatan terhadap perbedaan budaya dan otonomi organisasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat adalah penting untuk membangun inisiatif yang memadai bagi realitas sosial dan politik negara penerima.

4. Akuntabilitas - akuntabilitas terkait dengan berbagi tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Penting untuk memberi negara penerima pemberdayaan dan properti dalam proses kerjasama. Mendefinisikan prosedur yang jelas dan akun transparan - baik internal maupun eksternal - mendukung akuntabilitas.

5. Kepemilikan - Kepemilikan adalah salah satu prinsip terpenting dalam kerjasama segitiga. Kepemilikan terkait dengan kapasitas penerima untuk

³⁴UNDP, Frequently Asked Question, "South-South And Triangular Cooperation". 2.

³⁵UNDP. 4.

menginternalisasi dan menjaga tindakan tetap dimulai atau didukung oleh kerjasama internasional, seperti dengan mengadopsi kebijakan atau dengan melembagakan prosedur. Indikasi penting keberhasilan adalah sejauh mana negara penerima memiliki inisiatif dan hasil kerjasama internasional.

6. Keberlanjutan - pembangunan keberlanjutan dimulai dengan mengidentifikasi dan merencanakan inisiatif kerjasama dan melangkah lebih jauh ke arah penyelarasannya dengan strategi nasional dan politik negara-negara penerima. Keberlanjutan dampak dan inisiatif kerjasama tergantung pada pembangunan kapasitas teknis dan kelembagaan, serta pada penciptaan pemberdayaan dan kepemilikan oleh negara penerima.

7. Fleksibilitas - Fleksibilitas merupakan aspek penting dalam mengelola proses kerjasama segitiga. Prosedur dan tuntutan yang berbeda dari masing-masing pemangku kepentingan dalam proses koperasi dapat memengaruhi inisiatif kerjasama negatif atau bahkan melemahkannya. Fleksibilitas dan harmonisasi sangat penting untuk sinkronisasi dan prosedur yang memadai. Yang lebih penting lagi, hal itu akan mengurangi biaya transaksional dan meningkatkan efisiensi terkait dampak yang dihasilkan dari inisiatif ini.

8. Kelengkapan - menyangkut mengaitkan berbagai kekuatan kelembagaan, kapasitas teknis, dan keahlian dari penyedia baru dan donor tradisional untuk memenuhi kebutuhan negara-negara penerima dengan lebih baik.

Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular* sendiri masih belum memiliki arti yang baku, hal itu menyebabkan adanya perbedaan definisi dari para peneliti terhadap Kerjasama Selatan-Selatan dan *Triangular*. KSST adalah penyatuan dari

dua kerangka kerjasama internasional, yaitu KSS (Kerjasama Selatan-Selatan) dengan Kerjasama *Triangular*.³⁶

Sederhananya Kerjasama Selatan-Selatan adalah bentuk kerjasama antara dua ataupun beberapa negara berkembang yang meliputi kerjasama diberbagai bidang seperti, ekonomi, sosial, budaya, politik, pembangunan, teknis,serta pertukaran pengetahuan dan sumberdaya.³⁷ Dalam tulisannya Kakonge “*The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection*”, menjelaskan bahwa:

“Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proses dimana dua negara atau lebih yang sedang berkembang mengejar tujuan pembangunan individu atau kolektif melalui kerjasama berupa pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumberdaya, dan kecakapan teknis. Sedangkan Kerjasama *Triangular* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan tiga negara ataupun lebih dengan peran atau posisi yang berbeda-beda di masing-masing pihak. Kerjasama *Triangular* bukan hanya melibatkan negara selatan atau negara berkembang saja, tapi juga melibatkan negara utara ataupun negara maju dan juga institusi multilateral seperti lembaga donor atau organisasi internasional seperti PBB dan G20. Peran negara maju melalui lembaga dan institusi multilateral seperti PBB hanya sebagai pendukung saja, inisiatif kerjasama tetap harus dilakukan oleh

³⁶Bagus Mi'raz Prakoso, “Keanggotaan Indonesia Dalam G20 Dan Pengaruhnya Terhadap Peran Indonesia Di Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)”, Skripsi (S1) thesis, <http://repository.unpas.ac.id/27970/> (Diakses pada 13 November 2018) 19.

³⁷Kakonge, J.O, “The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection, Global Policy Essay, Juli. 1.

negara-negara selatan. Skema konfigurasi yang melibatkan negara selatan, negara maju, dan institusi multilateral ini disebut sebagai kerjasama *Triangular*".³⁸

Dari perspektif yang lebih luas, *Triangular Cooperation* adalah mekanisme berharga untuk mendukung pembangunan: strategi "lebih-untuk-kurang". Ketika diartikulasikan dengan baik, itu meningkatkan kemungkinan tindakan dengan lebih banyak keuntungan dan dengan biaya lebih rendah, dua karakteristik penting yang dicari dalam realitas global saat ini dari sumber daya yang kurang untuk bantuan pembangunan. Di sisi lain, ini berfungsi sebagai pembukaan untuk meningkatkan koneksi antara kedua "*co-donor*," yang bisa sangat relevan di dunia dengan pemain "baru" yang kuat.³⁹

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan desain penelitian eksplanatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang fokus pada kedalaman data bukannya keluasan data, sehingga metode ini memperoleh penemuan yang tidak bisa didapat dengan memakai prosedur statistik ataupun cara-cara lainnya dari pengukuran/kuantifikasi, menurut Ritchie dan Lewis.⁴⁰ Desain penelitian eksplanatif adalah desain penelitian yang berfokus pada hubungan antar variabel dengan terlebih dahulu memakai kerangka pemikiran menurut Suryana.⁴¹

³⁸Kakonge, J.O, 4.

³⁹Deborah B.L Farias, 10.

⁴⁰Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (London: Sage Publication, 2003), 3.

⁴¹Suryana, *METODOLOGI PENELITIAN: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), 9.

Dalam penelitian ini, kedalaman data yang akan dianalisis adalah Kejasama Selatan-Selatan dan *Triangular* dan menganalisa pengimpletasiannya dalam kesuksesan buku KIA di Sumatera Barat. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif.

1.8.1 Batasan Penelitian

Agar objek penelitian jelas dan tidak terjadi penyimpangan, peneliti hanya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari *Triangular Cooperation* dalam hal ini JICA dan Indonesia serta negara yang menerima bantuan dari Indonesia dalam pengaplikasian buku KIA yang mana Sumbar adalah salah satu dari beberapa provinsi yang berhasil dalam pengembangan buku KIA, hal ini dibuktikan dengan dipercayanya Sumbar sebagai tuan rumah TCTP (*Third Country Training Program*) di tahun 2009 dan untuk kedua kalinya pada tahun 2017.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis (variabel dependen) adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dianalisis, dan dideskripsikan. Variabel ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari variabel lain.⁴² Variabel yang dapat mempengaruhi unit analisis (variabel dependen) adalah sebuah unit eksplanasi (variabel independen). Variabel dependen muncul karena adanya variabel independen. Umumnya variabel dependen disebut sebagai variabel akibat, sedangkan variabel independen disebut sebagai variabel penyebab.⁴³ Tingkat analisis adalah area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam kajian

⁴²Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, (Yogyakarta: Psat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108.

⁴³Mochtar Mas' oed, 108.

hubungan internasional membantu ditingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.⁴⁴

Dari penjelasan diatas, yang akan menjadi unit analisisnya adalah implementasi *Triangular Cooperation*, sementara itu yang menjadi unit eksplanasinya kesuksesan buku KIA di Sumatera Barat. Terakhir level analisisnya berada pada level

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini berasal dari data sekunder dan wawancara. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.⁴⁵ Dalam penelitian ini, data-data sekunder yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen resmi Departemen Kesehatan RI, JICA, serta buku, artikel pada jurnal ilmiah, surat kabar online, situs, ataupun laporan penelitian yang terkait dengan *Triangular Cooperation* dan Kesuksesan Buku KIA di Sumatera barat.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Ada 3 tahapan dalam teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman, yang pertama adalah mereduksi data, yaitu teknis analisis data yang mengorganisasi dan mengelompokkan data berdasarkan konsep yang disusun secara sistematis. Yang kedua adalah penyajian data, yaitu menghubungkan data dengan kerangka konsep. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁶

⁴⁴Mochtar Mas' oed, 35.

⁴⁵Harnovinsah, Metodologi Penelitian: Modul 3 (Universitas Mercu Buana), 1.

⁴⁶Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Sage Publication, 1994), 18.

Didalam penelitian ini, tahap reduksi data dilakukan dengan menyusun dan mengelompokan data berdasarkan kata-kata kunci yang relevan seperti, “*Triangular Cooperation*” dan “Buku KIA Di Sumatera Barat” serta “JICA”. Pada tahap penyajian data, seluruh data yang diperoleh kemudian diurutkan dan dihubungkan berdasarkan 3 kondisi, yaitu Implementasi *Triangular Cooperation* di Indonesia, Kesuksesan Buku KIA Di Sumbar, dan Peran JICA dalam Kesuksesan Buku KIA di Sumbar. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, ditarik suatu generalisasi apakah implementasi *Triangular Cooperation*, kesuksesan buku KIA di Sumbar dan peran JICA dalam buku KIA di Sumbar bisa mempengaruhi peran Sumbar sebagai salah contoh daerah yang baik dalam pelaksanaan buku KIA terhadap negara lainnya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini berisi signifikansi penelitian dan bagaimana teknik mengelola penelitian tersebut yang dibagi ke dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, mafaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis bantuan Jepang terhadap Indonesia, kemudian akan dikerucutkan terkait dengan bantuan Jepang melalui buku KIA, baik itu sejarah maupun implementasinya.

BAB III : Bab ini berisi tentang bagaimana hasil dari pengaplikasian buku KIA di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi *triangular cooperation* melalui buku KIA. Bab ini akan berfokus pada keterlibatan Dinas Kesehatan Sumatera Barat dalam implementasi *triangular cooperation*.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan penelitian terkait bagaimana implementasi dari *triangular cooperation* dalam kesuksesan buku KIA di Sumatera Barat. Selain itu, saran penelitian juga dipaparkan.

